



PEMERINTAH ACEH SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.3/ 137 /2026

TENTANG

PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH TAHUN 2026

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Aceh tentang Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;

10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh;

11. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 29 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Gubernur;

MEMUTUSKAN.../2

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU ditetapkan berdasarkan usulan SKPA/Unit Kerja untuk ditindaklanjuti bersama pada Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Dalam hal tertentu yang dipandang perlu dan mendesak untuk kebutuhan penyelenggaraan, Pemerintah Aceh dapat mengajukan Rancangan Peraturan Gubernur Aceh meskipun tidak termasuk dalam Daftar Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sebagaimana pada Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Kepada Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) atau Biro pada Sekretariat Daerah Aceh pengusul Perencanaan Program Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh, agar segera mempersiapkan draft Rancangan Peraturan Gubernur berkoordinasi dengan Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh, serta dapat mengikutsertakan Tenaga Ahli/Unsur terkait lainnya jika dipandang perlu.
- KELIMA : Penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana DIKTUM KEEMPAT dilaksanakan dengan memperhatikan tahapan/mechanisme pembentukan Peraturan Gubernur Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Segala biaya akibat dikeluarkan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun Anggaran 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Aceh (DPA-SKPA) masing-masing dan/atau sumber pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 5 Maret 2026 M
15 Ramadhan 1447 H



LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 100.3.2/ 139 /2026
TENTANG PENETAPAN PERENCANAAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN
GUBERNUR ACEH TAHUN 2026

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL ACEH	Peraturan Gubernur Aceh tentang Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah		✓		Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah	Pergub ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam pemberian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan izin pertambangan yang merupakan salah satu perizinan berusaha, yang perlu menetapkan suatu pedoman yang membuat tata cara pemberian, pelaksanaan kegiatan usaha, dan kaidah teknik pertambangan	Peningkatan pendapatan asli aceh, Dana Bagi Hasil, Kepastian Berinvestasi di Aceh	
	Peraturan Gubernur tentang Pemberian WIUP, WPR, IUP dan IPR			✓	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pergub ini bertujuan sebagai pedoman teknis dalam pemberian, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan izin pertambangan yang merupakan salah satu perizinan berusaha, yang perlu menetapkan suatu pedoman yang membuat tata cara pemberian, pelaksanaan kegiatan usaha, dan kaidah teknik pertambangan	Peningkatan pendapatan asli aceh, Dana Bagi Hasil, Kepastian Berinvestasi di Aceh	
	Peraturan Gubernur tentang Harga Patokan MBLB	✓			Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pergub ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Aceh	Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (Pajak dan Opren Pajak)	
	Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang			✓	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pergub ini bertujuan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha pertambangan serta perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan di Provinsi Aceh	Peningkatan Pendapatan Asli Aceh (Pajak dan Opren Pajak)	
	Peraturan Gubernur tentang Dokumen Pengelolaan WPR			✓	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara	Pergub ini bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah dan pemangku kepentingan dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pengawasan pengelolaan WPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	Peningkatan pendapatan asli aceh, Dana Bagi Hasil, Kepastian Investasi di Aceh	
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2026	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Tahun 2026 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada PNS Tahun 2026; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengatur Teknis Pembayaran Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2026	Terlaksananya pembayaran Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2026	BIDANG PERBENDAHARAAN
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Teknis Pemberian Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh Tahun 2026	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Pemerintah Tahun 2026 tentang Pemberian Gaji, Pensun. Tunjangan, atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2026; 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengatur Teknis Pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2026	Terlaksananya pembayaran Gaji, Tunjangan atau Penghasilan Ketiga Belas Tahun 2026	BIDANG PERBENDAHARAAN
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengelolaan Daerah Mendahului Penerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2027	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengatur tentang Pengelolaan Daerah Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2027	Terlaksananya pengeluaran daerah untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib apabila penetapan APBD Tahun Anggaran 2027 belum ditetapkan secara tepat waktu	BIDANG PERBENDAHARAAN
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Digitalisasi Surat Perintah Pencairan Dana	✓			1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengatur tentang Digitalisasi Surat Perintah Pencairan Dana	Terlaksananya Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana lebih efektif dan efisien	BIDANG PERBENDAHARAAN
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Penjualan Barang Milik Aceh	✓			1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Aceh	Mengatur Tentang tata Cara Penjualan Barang Milik Aceh	Terbitnya Pengelolaan Barang Milik Aceh	BIDANG PBMA
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Penghapusan Barang Milik Aceh	✓			1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah 2. Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Teknis Pengelolaan Barang Milik Aceh	Mengatur tentang tata Cara Penghapusan Barang Milik Aceh	Terbitnya Pengelolaan Barang Milik Aceh	BIDANG PBMA
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Dasar Pengenaan Pajak Alat Berat Pembuatan Sebelum Tahun 2026	✓			1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya Nilai Jual Alat Berat	Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	BIDANG PENDAPATAN
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2026	✓			1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tersusunnya Nilai Jual Kendaraan Bermotor	Peningkatan penerimaan Pajak Daerah	BIDANG PENDAPATAN

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pemberian insentif fiskal PBBKB dan PAB	✓			1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Pemberian Keringanan dan Pengurangan Pokok PBBKB beserta Pembebasan Sanksi Administratifnya	Kemudahan Berusaha	BIDANG PENDAPATAN
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga	✓			1. UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 2. PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Tata Cara Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga	Peningkatan penerimaan Retribusi Daerah	BIDANG PENDAPATAN
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2026	✓			1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026	Memuat rincian detail pelaksanaan APBA yang telah disetujui dalam Qanun Aceh berupa Target Pendapatan Daerah dan Alokasi Belanja untuk berbagai Program dan kegiatan di seluruh SKPA	Mempercepat Realisasi Program dan Kegiatan yang telah direncanakan karena memberikan rincian teknis yang diperlukan untuk pencairan dana oleh SKPA	BIDANG ANGGARAN ACEH
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Tahun Anggaran 2025	✓			1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025	Memuat rincian detail pelaksanaan APBA yang telah disetujui dalam Qanun Aceh berupa Target Pendapatan Daerah dan Alokasi Belanja untuk berbagai Program dan kegiatan di seluruh SKPA	Mempercepat Realisasi Program dan Kegiatan yang telah direncanakan karena memberikan rincian teknis yang diperlukan untuk pencairan dana oleh SKPA	BIDANG ANGGARAN ACEH
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Aceh Tahun Anggaran 2026	✓			1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	Menjadi Acuan harga tertinggi untuk setiap unit barang dan jasa yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran	Standar Harga Satuan membantu memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan pada harga yang wajar dan kompetitif serta berfungsi sebagai pedoman teknis yang mengikat bagi semua pihak dalam pengelolaan keuangan daerah	BIDANG ANGGARAN ACEH
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2025			✓	PP 12 Tahun 2019 & Permendagri 77 Tahun 2020	Penjabaran dan Rincian Laporan Keuangan Pemerintah Aceh TA 2025 yakni, LRA, LPSAL, NERACA, Laporan Operasional, LPE dan Laporan Arus Kas dan Catatan atas	Transparansi dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBA TA 2025	BIDANG AKUNTANSI
	Peraturan Gubernur Aceh Tentang Kebijakan Akuntansi	✓			Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Koreksi atas pencatatan tahun sebelumnya 2. Penambahan masa manfaat atas beberapa aset tetap peralatan dan mesin 3. Koreksi Kriteria Aset extracom	Adanya Regulasi dan Standar Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh	BIDANG AKUNTANSI
BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan		✓		1. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 31 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Aceh Melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 31) 2. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2023 tentang Perubahan Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan (Berita Daerah Aceh Tahun 2022 Nomor 31)	Penggabungan Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2022 dan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Pemerintah Aceh melalui Jalur Pendidikan beberapa penyempurnaan dan dibuat dalam satu Peraturan Gubernur. Penyempurnaan menyinkron beberapa hal: a. Pendelegasian beberapa wewenang pada Pasal 9; penambahan program Fellowship dan profesi pada Pasal 10; jangka waktu program fellowship dan profesi pada pasal 16; ketentuan perpanjangan masa tugas belajar pada Pasal 18; Khusus tingkat pada Pasal 31; Pembiayaan pada ketentuan lain-lain pada Pasal 32	Memudahkan karena berada dalam 1 (satu) Peraturan Gubernur, Mengakomodir sistem pendidikan profesional	Selama belum diperbaharui masih memakai pergub 31/2022 dan pergub 23/2023
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pelaksanaan Qanun Dana Abadi Pendidikan		✓		1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2021 tentang Dana Abadi Bidang Pendidikan 2. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2025 tentang Dana Abadi Aceh Bidang Pendidikan	Pembentukan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pelaksanaan Qanun Dana Abadi Pendidikan	Adanya peraturan yang lebih rinci dan teknis sebagai pedoman dalam pengelolaan dana abadi pendidikan sebagai dasar hukum yang kuat untuk penggunaan dana demi kepentingan pendidikan jangka panjang untuk mewujudkan sumber daya manusia Aceh lintas generasi yang unggul dan berdaya saing	Selama Pergub belum disahkan penggunaan alokasi dana abadi pendidikan belum bisa dilaksanakan
	Perubahan Peraturan Gubernur Aceh tentang Beasiswa Pemerintah Aceh		✓		Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh	Penyempurnaan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 28 Tahun 2019 tentang Beasiswa Pemerintah Aceh, mengganti atau menambahkan pasal-pasal yang dianggap kurang jelas dan memerlukan penyesuaian dengan kebutuhan agar relevan dengan perubahan kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan yang belum tercakup dalam peraturan lama serta dibuat dalam satu Peraturan Gubernur	Adanya peraturan yang lebih spesifik dan terperinci dan memberikan dasar hukum yang kuat dalam pengelolaan beasiswa Pemerintah Aceh dan menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi Aceh	Selama belum diperbaharui masih memakai pergub Nomor 28 Tahun 2019
	Renstra, Pola Tata Kelola, dan SPM BLUD UPTD				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018)	Menjamin terlaksananya tata kelola pendidikan dan pelatihan pengembangan kompetensi dan sertifikasi bagi ASN dan Non ASN di Aceh yang menggunakan tarif dari Pemerintah maupun swasta	sebagai acuan atau panduan teknis dalam pelaksanaan diklat pengembangan kompetensi dan sertifikasi ASN dan Non ASN	
DINAS PEMUDA DAN OLARHAGA ACEH	Penyediaan Sarana Prasarana dan Pengelolaan Sarana Prasarana Kepemudaan				Qanun Nomor 4 Tahun 2018		Tindak Lanjut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 44 sampai dengan 47 dan Pasal 53 ayat (1)	
	Pemberian Penghargaan Kepada Pemuda Berprestasi				Qanun Nomor 4 Tahun 2018		Tindak Lanjut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 59 ayat (1)	
	Pengembangan Kepemimpinan, Kepeloporan dan Penyadaran Kepemudaan				Qanun Nomor 4 Tahun 2018		Tindak Lanjut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 17, 28 sampai dengan 39, Pasal 41 sampai dengan 42	
	Pendanaan Pembangunan Kepemudaan Aceh				Qanun Nomor 4 Tahun 2018		Tindak Lanjut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 67 sampai dengan 68	
	Pengembangan Kewirausahaan				Qanun Nomor 4 Tahun 2018		Tindak Lanjut Qanun Nomor 4 Tahun 2018 Pasal 22 sampai dengan 26	
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Peraturan Gubernur Penyelenggaraan RAD KLA Aceh	✓			1. Undang-Undang Perlindungan Anak (UU No. 35 Tahun 2014) 2. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak	Payung Hukum dalam rangka implementasi pelaksanaan Kab/Kota Layak Anak di Aceh	Tersedia dasar hukum dalam rangka implementasi pelaksanaan KLA di Aceh	
	Peraturan Gubernur tentang pelaksanaan pemberian restitusi dan kompensasi bagi perempuan dan anak korban kekerasan	✓			qanun No. 4 Tahun 2025 tentang Pelindungan Hak Perempuan	Payung Hukum dalam rangka turunan qanun No. 4/2025 tentang pelindungan hak perempuan	tersedianya dasar hukum terkait pemberian restitusi dan kompensasi bagi perempuan dan anak korban	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Aceh				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.	Penataan tugas dan fungsi	Bertambah tugas dan fungsi	

SKPA	TENTANG	Jenis			DASAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BIRO ORGANISASI SETDA ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Aceh				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah	Penataan Nomenklatur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja	Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Keuangan dan Aset Aceh				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penataan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja	Berubah struktur organisasi, tugas dan fungsi	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pendapatan Aceh				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	Penataan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja	Berubah struktur organisasi, tugas dan fungsi	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Ekonomi Kreatif, Pariwisata dan Kebudayaan Aceh				Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 21 Tahun 2016 tentang Hasil Pemetaan Urusan Pemerintahan dan pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pariwisata	Penataan Nomenklatur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja	Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, dan Penataan Ruang Aceh				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja	Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh				Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 32/Pr/M/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Penataan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja	Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pengaliran Aceh				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 106 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja	Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh				Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Penataan struktur organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja	Perubahan nomenklatur dan penyempurnaan tugas dan fungsi	
	Rancangan Peraturan gubernur Aceh tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Aceh				Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Mengatur Pemberton TPP bagi ASN pada Pemerintah Aceh	Sebagai dasar pembayaran TPP pegawai bagi ASN pada Pemerintah Aceh	
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2026 s.d 2029				Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2025 tentang RPJMA Tahun 2025-2029	Mengatur Rencana Aksi Pelaksanaan RB Pemerintah Aceh	Peningkatan Nilai RB	
DINAS SOSIAL ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Peraturan Pelaksanaan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas			✓	Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013 tentang Kesejahteraan Sosial	1. Sosialisasi Perlindungan dan Bantuan Hukum 2. Pemberian Insentif Kepada Perusahaan 3. Pemberian Bantuan, Dukungan dan Pendampingan Kewirausahaan 4. Pemberian Bantuan, Dukungan dan Pendampingan Koperasi 5. Upraya dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan 6. Standar Operasional Prosedur Evakuasi, Pendampingan dan Penyelamatan pada Situasi Darurat 7. Koneksi, Bentuk dan Bentuk dan Tata Cara Pemberian Insentif 8. Unit Layanan Disabilitas 9. Rombongan, Rombongan	1. Penyandang Disabilitas mendapatkan hak-haknya 2. Penyandang Disabilitas Mendapatkan pelayanan yang prima pada instansi penyelenggara pelayanan publik 3. Pemerintah Dapat mengimplementasikan kewenangannya dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas	
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA ACEH	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif				Peraturan presiden Nomor 200 Tahun 2024 tentang Badan Ekonomi Kreatif	Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif termasuk pembinaan, pemantauan, evaluasi, kemitraan dan fasilitasi bagi pelaku ekonomi kreatif Pengembangan dan pemanfaatan secara optimal melalui perluasan produk ekonomi kreatif daerah dengan penyediaan infrastruktur serta teknologi informasi dan komunikasi yang berkualitas guna menciptakan iklim usaha yang kondusif. Memberikan dasar kepastian hukum kepada pemerintah daerah dan pihak terkait dalam mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif	Regulasi yang mendukung industri kreatif dalam mendorong tersedianya lapangan kerja yang akan memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi daerah	
BADAN REINTEGRASI ACEH	Pelaksanaan Kewenangan Badan Reintegrasi Aceh				Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Reintegrasi Aceh	Konsolidasi Perdamai Pemberdayaan #Ekonomi masyarakat dan korban konflik Pelayanan dan rehabilitasi sosial masyarakat korban konflik Pendidikan Dasar Pencegahan dan Mitigasi Konflik Rincian Tugas Kabinet, staf pendukung dan tenaga teknis tidak tetap	Memenuhi hak dasar di bidang ekonomi politik dan sosial budaya untuk kesejahteraan masyarakat aceh meliputi eksa kombatan, Tapol, Napel dan Masyarakat yang berdampak korban konflik	
DINAS SYARIAH ISLAM	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Koperasi Pembiayaan Syariah			✓	Amanat Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.	1. Mengatur Koperasi dengan Prinsip Syariah 2. Standar Koperasi Syariah dan Kelengkapan Personil	1. Tidak implementatifnya Qanun LKS. 2. Masih beroperasi lembaga keuangan Konvensional.	Perintah hasil temuan APIP Tahun 2025
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Keuangan Non Formal dan Pegadaian Non Formal			✓	Amanat Qanun Aceh No.11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah.	1. Lembaga Keuangan Non Formal. 2. Lembaga Penggadaian Non Formal. 3. Mencegah praktik perekonomian yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.	1. Tidak implementatifnya Qanun LKS. 2. Beroperasinya lembaga keuangan non formal yang tdk sesuai dengan prinsip syariah	Perintah hasil temuan APIP Tahun 2025
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Penyelenggara Peribadatan dan Pengelola Harta Waqaf Masjid Raya Baiturrahman Aceh			✓	Undang-undang 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh Pasal 42 ayat (1) huruf e.	1. Penyusunan Imam Besar dan Wakil Imam Besar. 2. Periodisasi Imam Besar. 3. Pengelolaan harta wakaf dan aset MRB.	1. Tidak ada standarisasi kriteria Penyelenggara peribadatan. 2. Terjadi ketidak transparanan terhadap pengelolaan harta wakaf.	Transparansi kepemimpinan Penyelenggara dan pengelola MRB
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Pelaksanaan Hukum Jinayat			✓	Amanah Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.	1. Mengatur tata cara pelaksanaan 'Uqubat Ta'zir Tambahan. 2. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan restitusi.	1. Tidak implementatif dalam penegakan hukum jinayat. 2. Khawatir terjadi ketidak pastian hukum dan ketidakadilan bagi pelaku maupun korban.	Prioritas atas lahirnya revisi qanun jinayat tahun 2025
	Rancangan Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Peraturan Gubernur Aceh Nomor 5 Tahun 2018 tentang Hukum Acara Jinayat			✓	Amanah Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.	1. Pemisahan aturan pelaksana hukum jinayat dan hukum acara jinayat. 2. Perubahan terhadap pelaksanaan hukuman cambuk di lapas.	1. Terjadi kontradiktif sesama regulasi terkait aturan pelaksanaannya. 2. Terjadinya kesulitan instansi terkait dalam penerapan akibat cambuk di lapas.	Prioritas atas lahirnya revisi qanun jinayat tahun 2025

KEPA	TENTANG	Jenis			DAFTAR HUKUM	RESUME PENGATURAN	PELAKSANAAN	KETERANGAN
		Rutin	Revisi	Baru				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ACEH	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2027	✓			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dan Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2027	Perencanaan dan penganggaran SKPA dan Kabupaten/Kota tahun 2027 menjadi lebih fokus, terukur, dan tepat sasaran	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (RenjaSKPA) Aceh Tahun 2027	✓			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Perencanaan dan penganggaran SKPA sesuai dengan Isi Strategis, Tupoksi dan Kewenangan	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (PRKPA) Tahun 2026	✓			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dalam melakukan perubahan terhadap perencanaan dan penganggaran tahun 2026	Perencanaan dan penganggaran SKPA menjadi lebih fokus, terukur, dan tepat sasaran.	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat (P-RenjaSKPA) Aceh Tahun 2026	✓			Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dalam menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA)	Perubahan Perencanaan dan penganggaran SKPA sesuai dengan Isi Strategis, Tupoksi dan Kewenangan	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Strategis (RENSTRA) SKPA Tahun 2025-2029			✓	Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tatacara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta tata cara Perubahan RPJPD dan RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dan Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan dan penganggaran daerah tahun 2025-2029	Perencanaan dan penganggaran SKPA dan Kabupaten/Kota tahun 2025-2029 menjadi lebih fokus, terukur, dan tepat sasaran.	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 22 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan TDBH Migas dan Dana Otonomi Khusus			✓	Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus	Peraturan Gubernur Aceh ini merupakan pedoman kepada SKPA dan Kabupaten/Kota dalam melakukan perencanaan dan penganggaran daerah untuk alokasi sumber Dana TDBH Migas dan Otonomi Khusus	Perencanaan dan penganggaran SKPA dan Kabupaten/Kota untuk sumber Dana TDBH Migas dan Otonomi Khusus menjadi lebih fokus, terukur, serta tepat sasaran.	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal			✓	Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang Kebijakan Percepatan Penggerakragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh dan seluruh mitra pembangunan untuk meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pangan yang bergizi bagi Masyarakat	meningkatkan ketersediaan aneka ragam Pangan berbasis potensi sumber daya lokal untuk pemenuhan konsumsi Pangan dalam jumlah dan mutu yang cukup, beragam, bergizi seimbang, dan aman, merata, terjangkau, serta sesuai dengan preferensi masyarakat	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Induk dan Rencana Aksi Pergaraman Aceh			✓	Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional	Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat, sektor swasta, masyarakat dan seluruh mitra pembangunan Aceh agar dapat mempercepat pembangunan industri pergarman (terutama garam industri) di Aceh	meningkatkan produksi garam Aceh yang berkualitas untuk memenuhi kebutuhan industri wilayah Sumatera, mempercepat hilirisasi industri garam untuk meningkatkan nilai tambah dan kesejahteraan petani garam, serta mendukung Swasembada Garam Nasional pada tahun 2027.	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengembangan Komoditi Unggulan dan Strategis Berkelanjutan Aceh			✓	Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2022 tentang Tata Niaga Komoditas	Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh, sektor swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengembangan komoditas yang memiliki keunggulan dan nilai strategis berbasis kawasan terintegrasi dan berpegang pada prinsip keberlanjutan.	Aceh dapat meningkatkan Indeks Ekonomi Hijau dan Indeks Ekonomi Biru, Meningkatkan FDRB dari sektor Darat dan Laut, mengurangi emisi karbon (untuk mencapai net zero emission pada tahun 2043) serta beradaptasi terhadap perubahan iklim	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Aksi Daerah REDD+ Aceh			✓	Peraturan Presiden No. 110 Tahun 2025 tentang Nilai Ekonomi Karbon	Peraturan Gubernur bertujuan untuk mengoperasionalkan kebijakan dan komitmen REDD+ nasional pada tingkat daerah secara terukur, terkoordinasi, dan akuntabel. Tujuan utamanya adalah memberi dasar hukum bagi pendanaan blended finance dan kerja sama internasional berdasarkan Pasal 9 Paris Agreement	memberikan dampak positif berupa penurunan emisi gas rumah kaca sektor kehutanan dan penggunaan lahan, peningkatan cadangan karbon dan keanekaragaman hayati, penguatan tata kelola hutan dan lahan, peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan, serta terbukanya akses pendanaan iklim dan inovatif berbasis kinerja bagi daerah	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Pengelolaan Ekowisata Kawasan Ekosistem Luser Kurat Aceh			✓	Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2013 tentang Kepariwisata	Peraturan Gubernur ini menjadi pedoman bagi Satuan Kerja Perangkat Aceh, sektor swasta, dan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan ekowisata dalam kawasan ekosistem Luser, serta terintegrasi dan berpegang pada prinsip keseimbangan alam tetap terjaga dengan baik.	Aceh dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengelolaan dan pengembangan sektor pariwisata, dan khususnya dalam kawasan Luser merupakan salah satu laboratorium alam yang menyajikan keanekaragaman flora dan fauna yang menjadi daya tarik wisata alam	
	Peraturan Gubernur Aceh tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Daerah (RIPPID) Aceh Tahun 2025 - 2029			✓	Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Kelola Riset dan Inovasi di daerah	Peraturan Gubernur bertujuan untuk menjadi pedoman pada kegiatan riset dan inovasi di Aceh. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi peta jalan untuk mengharmoniskan agenda/agenda riset dan inovasi di Aceh agar tercipta keterpaduan, keberlanjutan, dan tepat sasaran dalam memberikan rekomendasi kebijakan pemerintah daerah.	Menjadi panduan bagi Pemerintah Aceh, khususnya untuk Bidang Riset dan Inovasi Daerah BAPPIDA Aceh guna mematu pelaksanaan agenda riset dan inovasi dalam jangka 5 tahun mendatang	

